

Analisis Ketercapaian Kota dan Permukiman Berkelanjutan di Kota Serang dan Surakarta: Perbandingan Kebijakan dan Implementasi

Tri Utami Setianingrum¹, Bramastia²

^{1,2} Program Studi S2 Pendidikan Sains, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutami no 36 Kentingen Surakarta

Email : triutami11@student.uns.ac.id

Abstract: Sustainable development has become one of the world agendas that is widely recognised by all countries as a solution to face increasingly troubling social, economic and environmental challenges. The purpose of this study is to analyse the achievement of point 11 of the SDGs, namely sustainable cities and settlements in the cities of Serang and Surakarta by comparing policies and implementation. The method used in the preparation of this journal is the literature study method. This method is a method used to be able to examine and analyse more deeply various relevant literature related to the analysis of the achievement of sustainable cities and settlements in the cities of Serang and Surakarta. In point 11 of the SDGs regarding sustainable cities and settlements, there are 7 indicators of achievement. However, this journal research focuses on discussing the 5 main indicators of the achievement of point 11 of the SDGs in Serang City and Surakarta City. The results showed that of the 5 target indicators analysed by researchers, in Serang City only 1 indicator has met the achievement of SDGs, namely target 11.4 preservation of culture and nature. There are still many targets that have not been met in the attacking city because there is no good synergy between the government and the community in achieving point 11 of the SDGs in sustainable cities and settlements. Meanwhile, in Surakarta City, there are 3 indicators that have been fulfilled, namely the Proportion of Population in Slum Areas in Surakarta City, Access to Public Transportation, and preservation of culture and nature. This can be achieved well because the government and the people of Surakarta are quite good at working together to realise the achievement of point 11 of the SDGs in sustainable cities and settlements.

Keywords: Sustainable, Residential, City

Abstrak: Pembangunan berkelanjutan telah menjadi salah satu agenda global yang diakui secara luas oleh semua negara sebagai solusi untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pencapaian poin 11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan di kota Serang dan Surakarta dengan membandingkan kebijakan dan implementasinya. Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode studi literatur. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk dapat mengkaji dan menganalisis secara mendalam berbagai literatur yang relevan terkait analisis pencapaian kota dan pemukiman berkelanjutan di kota Serang dan Surakarta. Pada poin 11 SDGs mengenai kota dan pemukiman berkelanjutan, terdapat 7 indikator pencapaian. Namun, penelitian jurnal ini fokus pada pembahasan 5 indikator utama pencapaian poin 11 SDGs di Kota Serang dan Kota Surakarta. Hasil menunjukkan bahwa dari 5 indikator target yang dianalisis oleh peneliti, di Kota Serang hanya 1 indikator yang telah mencapai target SDGs, yaitu target 11.4 pelestarian budaya dan alam. Masih banyak target yang belum tercapai di Kota Serang karena tidak adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai poin 11 SDGs terkait kota dan pemukiman berkelanjutan. Sementara itu, di Kota Surakarta, terdapat 3 indikator yang telah terpenuhi, yaitu Proporsi Penduduk di Kawasan Kumuh di Kota Surakarta, Akses terhadap Transportasi Umum, dan pelestarian budaya dan alam. Hal ini dapat tercapai dengan baik karena pemerintah dan masyarakat Surakarta cukup baik dalam bekerja sama untuk mewujudkan pencapaian poin 11 SDGs dalam kota dan pemukiman berkelanjutan.

Kata kunci: Berkelanjutan, Perumahan, Kota

1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi salah satu agenda dunia yang diakui secara luas oleh seluruh negara sebagai solusi untuk dapat menghadapi tantangan sosial, ekonomi dan juga lingkungan yang semakin meresahkan. Menurut Andin (2024) menjelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mencapai pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam berbagai kebijakan dan program yang diterapkan di setiap daerah di indonesia. Kota Serang dan Kota Surakarta, sebagai kota dengan karakteristik tantangan yang berbeda, menjadi contoh yang menarik untuk dapat dianalisis ketercapaian pembangunan berkelanjutannya.

Kota Serang ialah ibu kota dari provinsi Banten secara pesat telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan industri dan urbanisasi. Akan tetapi, pertumbuhan ini juga telah membawa dampak negatif, seperti munculnya kemacetan, ketimpangan sosial dan juga yang paling sering ditemukan yaitu pencemaran lingkungan. Di sisi lain, kota Surakarta yang sangat terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya juga telah mengalami tantangan dalam mempertahankan warisan budaya dan sejarah dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. Kota ini masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut yang mencerminkan pendekatan yang diambil oleh pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutannya.

Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk melakukan analisis mendalam terhadap ketercapaian pembangunan di dua kota tersebut. Terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kapasitas lembaga, ketersediaan sumber daya dan juga partisipasi masyarakat (Saguni, 2024). Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap kebijakan pelaksanaan dari pembangunan berkelanjutan di kota Serang dan kota Surakarta dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan bahkan juga kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutannya.

Salah satu aspek yang terpenting dalam analisis yaitu membandingkan antara kebijakan yang diterapkan di dua kota tersebut. Kota Serang, dengan fokus pada pengembangan industri dan infrastruktur, memiliki pendekatan yang berbeda dengan kota Surakarta yang lebih menekankan pada lingkungan dan juga budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Simarmata (2021) menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan kebijakan ini dapat sangat mempengaruhi hasil dari pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan juga partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dapat terus mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang berbeda ini diterapkan dan dampaknya terhadap ketercapaian pembangunan berkelanjutannya.

Selanjutnya, penerapan dari kebijakan juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ketercapaian pembangunan berkelanjutan. Meskipun kebijakan yang baik telah dirumuskan, jika tidak ada penerapan yang efisien dan efektif maka tujuan pembangunan tidak akan dapat tercapai. Penelitian oleh Ibrahim (2024) menjelaskan bahwa tantangan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya anggaran yang ada dan rendahnya kesadaran masyarakat. Maka dari itu, analisis terhadap penerapan kebijakan di kota Serang dan kota Surakarta perlu dilakukan untuk dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemukan sehingga dapat mencari solusi yang tepat.

Saat ini indonesia telah berkomitmen untuk dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diterapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan adanya komitmen ini untuk diwujudkan dalam berbagai kebijakan nasional dan daerah yang bertujuan

untuk dapat diintegrasikan antara prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan juga perencanaan kota. Namun, dalam pencapaian TPB di tingkat lokal terkadang menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan dan kurangnya dukungan politik. Oleh karena itu, analisis ketercapaian pembangunan berkelanjutan di kota Serang dan kota Surakarta tidak hanya relevan untuk memahami dinamika lokal, akan tetapi juga secara nyata berkontribusi dalam upaya mencapai tujuan nasional pada pembangunan berkelanjutan..

Pada poin 11 SDGs mengenai kota dan permukiman berkelanjutan terdapat 7 indikator ketercapaian. Namun dalam penelitian jurnal ini berfokus membahas 5 indikator utama ketercapaian dari poin 11 SDGs di Kota Serang dan Kota Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penyusunan jurnal ini yaitu metode studi literatur. Metode ini ialah metode yang digunakan untuk dapat mengkaji dan menganalisis lebih mendalam berbagai literatur yang relevan terkait analisis ketercapaian kota dan permukiman berkelanjutan di kota Serang dan Surakarta. Metode ini melibatkan pengumpulan data review jurnal, evaluasi dan sintesis dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik dari jurnal, buku, website yang diakses melalui google scholar, elsevier, researchgate dan web lainnya yang relevan membahas mengenai ketercapaian kota dan permukiman pembangunan berkelanjutan khusus di Kota Serang dan Kota Surakarta. Fokus utama studi literatur ini yaitu merangkum temuan-temuan yang ada, mengidentifikasi mengenai ketercapaian kota dan permukiman dalam pembangunan berkelanjutan (Sugiyono, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini berfokus pada tujuan poin 11 *Sustainable Development Goals* yaitu menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, tangguh, aman dan berkelanjutan, yang memiliki peran sangat penting karena urbanisasi yang cepat di seluruh dunia menyebabkan berbagai masalah seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial dan juga kerusakan lingkungan. Tujuan poin 11 SDGs bertujuan untuk dapat memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap perumahan yang aman dan terjangkau, transportasi umum yang efisien dan ruang terbuka hijau. Di indonesia sendiri sebagian besar populasi tinggal di daerah perkotaan, sehingga ketercapaian tujuan poin 11 SDGs ini sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas hidup.

Pada poin 11 SDGs mengenai kota dan permukiman berkelanjutan memiliki tujuh sasaran indikator utama dalam pembangunan perkotaan mencakup aspek krusial yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Permasalahan kemiskinan dan ketidaklayakan hunian di perkotaan menjadi fokus pertama, yang tercermin dari proporsi penduduk yang tinggal di daerah kumuh dan permukiman liar. Akses transportasi publik yang nyaman dan merata menjadi indikator kedua yang penting untuk mendukung mobilitas warga. Keseimbangan antara konsumsi lahan dan pertumbuhan penduduk juga menjadi perhatian serius dalam perencanaan wilayah perkotaan. Pelestarian warisan budaya dan alam, manajemen risiko bencana, pengelolaan limbah padat, serta pengembangan ruang terbuka hijau merupakan indikator strategis yang menentukan keberlanjutan dan kualitas lingkungan perkotaan. Penelitian ini fokus menganalisis lima indikator tersebut dengan membandingkan implementasi dan kebijakan di Kota Serang dan Kota Surakarta. 5 sasaran indikator yang digunakan dalam analisis yaitu indikator proporsi penduduk di daerah kumuh; akses transportasi publik; pelestarian warisan budaya; pengelolaan sampah di perkotaan; dan ruang terbuka hijau di perkotaan. Berikut hasil analisis ketercapaian sasaran indikator di Kota Serang dan Kota Surakarta pada implementasi dan kebijakannya:

3.1. Indikator 11.1 proporsi penduduk di daerah kumuh

a. Ketercapaian di Kota Serang

Di kota Serang, Provinsi Banten, permasalahan mengenai permukiman kumuh telah menjadi salah satu isu yang sering dibicarakan dan sehingga diperlukan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kotabaru menunjukkan bahwa kondisi permukiman yang sangat memprihatinkan dengan tingkat kekumuhan yang beragam, dan masuk dalam kategori mulai dari yang sedang sampai kumuh berat. Analisis mendalam yang dilakukan oleh Kurniasari (2018) mengungkapkan bahwa permasalahan permukiman kumuh tidak sekedar terkait kondisi fisik lingkungan saja, melainkan juga mencakup kompleksitas dan legalitas lahan serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat setempat. Berikut disajikan dalam tabel 1 kondisi tingkat kekumuhan di berbagai RT dan RW di wilayah Kotabaru:

Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Kekumuhan Kotabaru

No	Variabel	Bobot			
		RW 1	RW 2	RW 3	RW 5
Karakteristik Lingkungan					
1	Kondisi bangunan rumah	7	9	13	13
	Keteraturan bangunan	1	1	3	3
	Kepadatan bangunan	5	5	5	5
	Kualitas bangunan	1	3	5	5
2	Prasarana lingkungan	56	56	64	68
	Prasarana jalan	4	4	8	8
	Ketersediaan air minum	4	4	4	4
	Saluran drainase	15	15	19	21
	Pengelolaan limbah	8	8	8	10
	Pengelolaan persampahan	15	15	15	15
	Proteksi kebakaran	10	10	10	10
	Total	63	65	77	81
	Tingkat kekumuhan	K2	K2	K3	K3
	Legalitas lahan	(-)	(-)	(-)	(-)
Pertimbangan Lain					
1	Nilai strategis lokasi	5	5	5	5
2	Kependudukan	5	5	5	5
3	Potensi ekonomi, sosial, budaya	1	1	1	1
	Sub Total	11	11	11	11

Tingkat kekumuhan yang diamati di wilayah Kotabaru Kota Serang menggambarkan tantangan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya penataan permukiman yang layak huni dan higienis. Kondisi lingkungan yang tidak layak huni, infrastruktur yang masih sangat minim serta keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar menjadi indikator utama yang menandakan rendahnya kualitas permukiman di Kotabaru.

Penilaian dengan menggunakan metode skoring dalam penelitian (Prasetya, 2024) memperlihatkan bahwa sebagian besar area permukiman mengalami degradasi lingkungan yang sangat signifikan, sehingga dapat berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan penduduk. Pemerintah daerah sendiri sebenarnya telah merumuskan beberapa konsep penanganan yang potensial, diantaranya yaitu melalui pendekatan peremajaan kawasan dengan metode *land sharing* dan rencana pembangunan rumah susun. Diharapkan dengan adanya konsep ini akan dapat menjadi solusi nyata yang tidak hanya sekedar mengatasi permasalahan fisik permukiman, tetapi juga memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan sampai sekarang rencana tersebut belum dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

Sehingga dapat diketahui bahwa terkait target *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya poin 11.1 yang fokus pada pengurangan proporsi penduduk yang tinggal di daerah kumuh, Kota Serang belum tercapai. Ketiadaan tindakan nyata dari

pemerintah setempat mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program penataan permukiman. Hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi memperburuk keadaan ekonomi dan sosial masyarakat yang dtinggal dikawasan tersebut.

b. Ketercapaian di Kota Surakarta

Permukiman kumuh di kawasan semanggi kota Surakarta menjadi salah satu fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor fundamental. Terjadinya proses urbanisasi yang intensif menjadi kontributor utama, dimana penduduk dari wilayah pedesaan bermigrasi ke perkotaan secara signifikan mempengaruhi dinamika kondisi permukiman. Faktor ekonomi turut berperan penting, di mana keterbatasan ekonomi masyarakat mendorong mereka untuk menempati kawasan dengan infrastruktur terbatas dan kondisi hunian yang tidak memadai (Siswanto, dkk, 2024).

Karakteristik sosial budaya masyarakat Semanggi juga memainkan peranan krusial dalam pembentukan permukiman kumuh. Pola adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan lahan perkotaan, ditambah dengan kompleksitas status kepemilikan bangunan yang tidak jelas, semakin memperumit persoalan. Sarana dan prasarana yang minim, ditambah dengan permasalahan kelembagaan dan tata pemerintahan yang kurang responsif, semakin memperdalam persoalan kekumuhan di kawasan tersebut.

Upaya pemerintah Kota Surakarta dalam menangani permasalahan ini ditunjukkan melalui kebijakan pemekaran Kelurahan di Semanggi pada tahun 2019. Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017, dilakukan pembentukan Kelurahan Mojo sebagai bagian dari strategi penanganan kawasan kumuh. Pemekaran ini membawa dampak signifikan terhadap struktur kependudukan, dengan total jumlah penduduk Kawasan Semanggi mencapai 54.594 jiwa, dan mengakibatkan penurunan kepadatan penduduk di Kelurahan Gandekan dan Kelurahan Sewu (Araujo, dkk, 2023).

Kebijakan pemekaran wilayah dan upaya redistribusi penduduk ini menunjukkan ketercapaian positif dalam rangka mewujudkan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 11.1 terkait pengurangan proporsi penduduk di permukiman kumuh. Dengan strategi sistematis yang mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan, Kota Surakarta telah menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakatnya.

3.2. Indikator 11.2 Akses Transportasi Publik

a. Ketercapaian di Kota Serang

Akses transportasi umum di kota Serang, Provinsi Banten menunjukkan bahwa telah mengalami tantangan yang signifikan jika dibandingkan dengan kota Surakarta. Mengacu pada Surat Keputusan Walikota Serang Nomor 551.23/kep.74-Huk/2009 mengenai penetapan jaringan trayek penumpang angkutan umum di kota Serang terbagi menjadi 10 trayek dengan memberikan ciri pada nomor dan warna angkutan umum yang berbeda untuk masing-masing trayek. Berikut gambar transportasi umum yang ada di kota Serang Banten:



Gambar 1. Angkutan umum di kota Serang

Akan tetapi pada implementasinya 10 trayek angkutan umum yang beroperasi tidak mengikuti arahan SK walikota Serang, sehingga banyak trayek gemuk dan trayek kurus. Kondisi ini tentunya membawa kerugian bagi banyak pihak, terutama pengguna jasa angkutan umum. Apabila tingkat kepercayaan masyarakat pengguna angkutan umum menurun, maka tingkat keterisian angkutan juga kurang memberikan kenyamanan terhadap penumpang, seperti kaca jendela mobil angkutan yang terbuka, supir angkutan umum yang merokok dan kelebihan frekuensi penumpang (Rahayu & Prasetyanto, 2021).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di kota Serang pada sasaran indikator 11.2 mengenai akses transportasi publik belum terpenuhi.

b. Ketercapaian di Kota Surakarta

Di sisi lain, Surakarta telah menunjukkan kemajuan dalam pengembangan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan efisien. Dengan hadirnya Batik Solo Trans (BST) dan sistem transportasi yang lebih terorganisir. Disajikan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Waktu tempuh BST

Armada	Waktu tempuh	Jarak tempuh
BST 1	90 menit	17,2 KM
BST 2	60 menit	11,5 KM
Bus	70 menit	11 KM
Koridor 3		

Analisis waktu tempuh Bus Setra Trans (BST) di Surakarta menunjukkan variasi durasi perjalanan antar koridor yang menarik. Koridor I memiliki rata-rata waktu tempuh 90 menit, Koridor II selama 60 menit, dan Koridor III mencapai 70 menit, dengan rata-rata keseluruhan 73 menit. Durasi ini masih berada dalam batas standar ideal waktu perjalanan transportasi umum, yang menandakan efisiensi sistem transportasi kota. Berikut disajikan gambar 2 BST sebagai transportasi umum di kota Surakarta:



Gambar 2. Transportasi umum di kota Surakarta

Keberadaan BST sebagai moda transportasi publik memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan mobilitas perkotaan. Waktu tempuh yang relatif singkat dan terjangkau ini berpotensi mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Hal tersebut tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mendukung upaya mengurangi kemacetan dan dampak lingkungan dari penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan (Nurdiani, dkk, 2017). Sehingga dapat disimpulkan

bawa di Kota Surakarta pada sasaran indikator SDGs 11.2 mengenai transportasi publik sudah terpenuhi.

3.3. Indikator 11.4 Pelestarian Warisan Budaya dan Alam

a. Ketercapaian di Kota Serang

Pelestarian warisan budaya dan alam di kota Serang provinsi Banten telah menjadi perhatian penting dalam Pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata peninggalan budaya di kota Serang yaitu keraton Surosowan keraton kaibon, dan situs bersejarah lainnya yang mencerminkan kekayaan Sejarah dan budaya lokal. Menurut kebijakan pemerintah melalui undang-undang nomor 11 tahun 2010 menjelaskan bahwa cagar budaya daerah harus tetap dilestarikan dan dijaga sebagai warisan budaya.

Berdasarkan dari kebijakan tersebut, maka kondisi dari keraton surosowan sendiri terjaga dengan baik, hal ini dapat dicapai karena Kerjasama yang erat antara Masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena situs peninggalan sejarah mampu menjadi sarana yang berisikan nilai rekreatif, edukatif, dan informatif yang akan meningkatkan perekonomian dari daerah tersebut, serta menanamkan nilai kebudayaan bagi masyarakat lokal ataupun mancanegara, sekaligus sebagai penciptaan generasi dengan kepribadian berbangsa (Rifqiawati, dkk, 2023). Berikut disajikan gambar 3 peninggalan salah satu warisan budaya kota Serang yaitu keraton Surosowan:



Gambar 3. Keraton Surosowan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kota Serang pada sasaran indikator SDGs 11.4 mengenai pelestarian warisan budaya sudah terpenuhi.

b. Ketercapaian di Kota Surakarta

Menurut Suryatmodjo (2023) menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan berbasis warisan budaya adalah pendekatan yang menekankan pentingnya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya sebagai bagian integral dari pengembangan pariwisata. Surakarta, sebagai salah satu kota budaya di Indonesia, memiliki berbagai situs sejarah seperti Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata sambil menjaga keaslian dan nilai budaya yang ada. Berikut disajikan gambar 4 salah satu warisan budaya kota Surakarta yaitu keraton Surakarta dan pura Mangkunegaran:



Gambar 4. Keraton Surakarta



Gambar 5. Pura Mangkunegaran

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kota Surakarta pada sasaran indikator SDGs 11.4 mengenai pelestarian warisan dan budaya sudah terpenuhi.

3.4. Indikator 11.6 Pengelolaan Sampah di Perkotaan

a. Ketercapaian di Kota Serang

Pengelolaan sampah perkotaan di Provinsi Banten menghadapi tantangan besar seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi. Simulasi model BAU mengungkap kompleksitas permasalahan pengelolaan sampah di Kota Serang. Cakupan pelayanan persampahan yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi tantangan signifikan.

Proyeksi dari 2008-2030 menunjukkan hanya 46,37% penduduk per tahun yang terlayani, jauh di bawah target 70%. Selain itu, TPA Cilowong diprediksi akan mencapai titik jenuh pada tahun 2030, mengindikasikan kebutuhan mendesak akan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Mulyati, dkk, 2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kota Serang pada sasaran indikator SDGs 11.6 mengenai pengelolaan sampah perkotaan belum terpenuhi.

b. Ketercapaian di Kota Surakarta

Tabel 3. Sistem pengelolaan sampah di kawasan Semanggi Surakarta tahun 2020

Kelurahan	Pengelolaan Persampahan		
	Jumlah KK dengan Pengelolaan Persampahan Sesuai Persyaratan Teknis	Jumlah Sampah Domestik Rumah Tangga Terangkut ke TPS/TPA	
Kedung Lumbu	75	14%	5%
Sangkrah	311	59%	13%
Semanggi	49	9%	38%
Mojo	94	18%	44%
Jumlah	529	100%	100%

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta tahun 2020, terdapat 529 Kepala Keluarga (KK) dengan sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis. Sistem pengelolaan persampahan yang baik ditandai dengan ketersediaan sarana prasarana seperti tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), gerobak sampah, dan fasilitas pengolahan sampah. Kualitas sistem persampahan dapat diukur dari kemampuan mengangkut sampah secara efektif ke TPS/TPA. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa belum seluruh lokasi terlayani sistem pengangkutan sampah yang optimal, dengan frekuensi pengangkutan hanya dua kali seminggu, yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan dan kesehatan (Araujo, dkk, 2021).

Berdasarkan data pengelolaan sampah yang sesuai terdapat 529 KK sedangkan sampah yang tersangkut ke TPS 1.046, sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kota Surakarta pada sasaran indikator SDGs 11.6 mengenai pengelolaan sampah perkotaan belum terpenuhi.

3.5. Indikator 11.7 Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan

a. Ketercapaian di Kota Serang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah komponen vital dalam ekosistem perkotaan, memiliki beragam bentuk mulai dari hutan kota, taman, lapangan olahraga, hingga jalur hijau sepanjang infrastruktur seperti jalan raya dan bantaran sungai. Dengan perannya sebagai paru-paru kota, RTH berperan kritis dalam memproduksi oksigen dan menjaga keseimbangan lingkungan. Undang-undang Penataan Ruang Tahun 2007 menetapkan standar minimal 30% luas kawasan perkotaan sebagai RTH, yang diperlukan untuk menjamin keseimbangan sistem hidrologi, mikroklimat, dan ekologis.

Namun, realitanya menunjukkan ketimpangan persebaran RTH, dengan hanya dua kecamatan Kasemen dan Cipocok Jaya yang berhasil memenuhi standar tersebut, sementara kecamatan lainnya masih jauh dari target ideal (Pangesti, dkk, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kota Serang pada sasaran indikator SDGs 11.7 mengenai ruang terbuka perkotaan belum terpenuhi.

b. Ketercapaian di Kota Surakarta

Ruang terbuka hijau dimiliki setiap kota dan harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat umum. Surakarta, sebagai salah satu kota di Indonesia, menghadapi tantangan dalam pengelolaan ruang terbuka perkotaan (RTP).

Menurut Penelitian Ramadhanty (2021) didapatkan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dinilai belum memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil wawancara dan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup, yang mengungkapkan minimnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses perencanaan.

Kondisi ini mengakibatkan pembangunan menjadi terlantar dan memprihatinkan. Pemetaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa RTH publik hanya mencapai 8,47%, jauh di bawah ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 yang menetapkan batas minimal 20% dari luas wilayah kota. Rendahnya persentase RTH publik ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan perkotaan. Berikut disajikan gambar 6 salah satu ruang terbuka di kota Surakarta yaitu taman balekambang:



Gambar 6. Taman balekambang

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kota Surakarta pada sasaran indikator SDGs 11.7 mengenai ruang terbuka perkotaan belum terpenuhi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil analisis pemakalah dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran indikator yang dianalisis oleh peneliti yaitu di Kota Serang hanya 1 indikator yang sudah memenuhi ketercapaian SDGs yaitu pada sasaran 11.4 pelestarian budaya dan alam. Masih banyaknya sasaran yang belum terpenuhi di Kota Serang disebabkan belum ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mencapai SDGs poin 11 mengenai kota dan permukiman berkelanjutan. Sedangkan di Kota Surakarta terdapat 3 indikator yang terpenuhi yaitu Proporsi Penduduk di Daerah Kumuh di Kota Surakarta, Akses Transportasi Publik, dan pelestarian budaya dan alam. Hal ini dapat tercapai dengan baik karena pemerintah dan masyarakat Surakarta cukup baik dalam bersinergi mewujudkan ketercapaian poin 11 SDGs dalam kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Saran dalam penelitian selanjutnya yaitu lebih banyak menganalisis penggunaan jurnal di wilayah atau kota yang berbeda agar dapat mengetahui ketercapaian pembangunan keberlanjutan khususnya di poin 11 SDGs yaitu pada kota dan permukiman berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andin, I. W., Evantrino, M. D., & Pertiwi, R. P. (2024). *Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 3(3), 294-308. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3919>
- Araujo, C. M., Astuti, W., & Yudana, G. (2023). *Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta*. Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman, 5(2), 155-169.
- Ibrahim, A. W., Ahmad, I., & Moonti, R. M. (2024). *Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Angkutan Antar Provinsi*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1(4), 60-72.
- Kurniasari, L., Koestoeer, R. H., & Suganda, E. (2018). *Konsep penanganan permukiman kumuh kelurahan Kotabaru Kota Serang (Concept of slum handling in Kotabaru Serang City)*. J. Manusia & Lingkungan, 25(2), 66-72. <https://doi.org/10.22146/jml.24979>
- Mulyati, B., Ilmi, Y. F., & Basri, A. (2023). *Sosialisasi pengelolaan sampah sebagai upaya peningkatan peran masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Serang*. Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 26-34.
- Nurdiani, D. (2017). *Kesesuaian Sistem Transportasi Umum Di Kota Surakarta Terhadap Konsep Transportation for Livable City*.
- Pangesti, F. S. P., & Dwirani, F. (2018). *Analisis kesesuaian ruang terbuka hijau di Kota Serang*. Jurnal Serambi Engineering, 3(2).
- Prasetya, F. A., & Wibowo, A. (2024). *Analisis Spasial Tingkat Kesesuaian Lahan Permukiman Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kota Tangerang*. Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi, 8(2), 136-146. <https://doi.org/10.29408/geodika.v8i2.26065>
- Rahayu, R. P., & Prasetyanto, D. (2021). *Kualitas Pelayanan Angkutan Kota Trayek Margahayu-Ledeng Di Kota Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19*. Prosiding FTSP Series, 199-210.
- Ramadhanty, A. I. (2021). *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Universitas Sebelas Maret.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rifqiawati, I., Utari, E., Aulia, M. J., & Salsabila, T. (2023). Riwayat bangunan bersejarah sebagai peninggalan masa kesultanan Banten. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 13(2), 145-162. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v13i2.14491>

Saguni, D. S., & Djabbari, M. H. (2024). Strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Pelaksanaan Kebijakan SDGs Desa untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan BerkelaJutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 96-127.

Simarmata, D. S., Tresiana, N., & Hutagalung, S. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan BerkelaJutan. *Jurnal Administrativa*, 3(3), 343-359.

Siswanto, D. J., Saksono, M. S., Silitonga, F., Herawati, T., & Leandro, F. (2024). Dampak Pengelolaan Pembangunan Terhadap Kesadaran Bela Negara Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Timor LESTE. *Jurnal Mahavirya*, 11(2), 65-80.

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suryatmodjo, G., Umbas, C. A., Marini, V. M., Budiman, D. H., & Setyastanto, A. M. (2023). Strategi Ekonomi Pembangunan Pariwisata di Wilayah Mayoritas Muslim Untuk Pariwisata BerkelaJutan. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 264-277.